

# IMPLEMENTASI PROGRAM JEBOL ANDUK (JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI KELURAHAN PACARKELING KOTA SURABAYA

Husnul Hosida

[husnulhosida.21015@mhs.unesa.ac.id](mailto:husnulhosida.21015@mhs.unesa.ac.id)

Universitas Negeri Surabaya

## ABSTRAK

Program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen kependudukan. Penelitian ini menganalisis implementasi program tersebut di Kelurahan Pacarkeling, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam program Jebol Anduk telah berjalan efektif melalui penyampaian informasi oleh petugas kelurahan kepada masyarakat. Sumber daya dalam program ini memadai, baik dari segi tenaga petugas maupun sarana pendukung. Disposisi petugas dalam melayani warga menunjukkan dedikasi dan etika pelayanan yang baik. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini juga telah terkoordinasi dengan baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelurahan, serta petugas lapangan. Kesimpulannya, program Jebol Anduk berhasil meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Pacarkeling, meskipun perlu dilakukan sosialisasi lebih luas dan peningkatan jumlah petugas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pelayanan Publik, Jemput Bola, Administrasi Kependudukan.

## ABSTRACT

*The Jebol Anduk Program (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) is an innovation in civil administration services aimed at improving public accessibility to civil documents. This study analyzes the implementation of the program in Pacarkeling Subdistrict, Surabaya City, using George Edward III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that communication within the Jebol Anduk program has been effective, with local officials successfully delivering information to the public. The program's resources are adequate in terms of both personnel and supporting facilities. The disposition of officers in serving the community reflects dedication and good service ethics. The bureaucratic structure in the implementation of this program is well-coordinated among the Civil Registration Office, the subdistrict, and field officers. In conclusion, the Jebol Anduk program has successfully improved the quality of civil administration services in Pacarkeling Subdistrict. However, broader public outreach and an increase in the number of personnel are needed to reach more residents.*

**Keywords:** Effectiveness, Public Service, Mobile Service, Civil Administration.

## PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang krusial bagi masyarakat karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil, seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk. Namun, pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur yang berbelit, keterbatasan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan

waktu, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan (Geograf, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah mendirikan organisasi yang bertugas menyelenggarakan layanan publik. Organisasi ini mencakup institusi penyelenggara negara, korporasi, serta lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik, termasuk badan hukum lain yang berfokus pada kegiatan tersebut (Lopes, 2013). Setiap penyelenggara, beserta seluruh bagian dalam organisasinya, bertanggung jawab atas kegagalan, pelanggaran, atau ketidakmampuan dalam menjalankan pelayanan. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, setiap penyelenggara layanan publik, baik yang melayani masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus disertai dengan perencanaan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan di lingkungan masing-masing. (Indonesia, 2009).

Pelayanan administrasi kependudukan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa layanan ini mencakup pengelolaan dan pengaturan dokumen serta data kependudukan. Proses tersebut dilakukan melalui dengan cara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan untuk keperluan pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor lainnya (Ananda & Nawangsari, 2024). Sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi utama dalam pengelolaan dokumen kependudukan masyarakat. Namun, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tantangan dalam administrasi kependudukan semakin kompleks (Kemendagri, 2025).

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 3.009.286 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Distribusi penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Penduduk (jiwa)
	Laki- Laki	Perempuan	
Karangpilang	37.361	38.211	75.572
Jambangan	26.827	27.373	54.200
Gayungan	21.485	22.514	43.999
Wonocolo	39.457	40.529	79.986
Tenggilis Mejoyo	28.994	29.996	58.990
Gunung Anyar	30.452	31.113	61.565
Rungkut	60.184	61.757	121.941
Sukolilo	56.793	58.306	115.099
Mulyorejo	43.011	44.545	87.556
Gubeng	65.303	68.501	133.804
Wonokromo	76.001	78.994	154.995
Dukuh Pakis	29.436	30.096	59.532
Wiyung	37.481	37.901	75.382

Lakarsantri	32.015	32.047	64.062
Sambikerep	33.743	34.200	67.943
Tandes	45.207	46.715	91.922
Sukomanunggal	52.030	52.756	104.786
Sawahan	98.445	100.891	199.336
Tegalsari	48.429	49.888	98.317
Genteng	28.779	29.963	58.742
Tambaksari	112.177	114.818	226.995
Kenjeran	91.217	90.083	181.300
Bulak	23.413	23.669	47.082
Simokerto	46.117	46.566	92.683
Semampir	91.367	91.004	182.371
Pabean Cantian	36.900	37.590	74.490
Bubutan	48.127	49.146	97.273
Krembangan	57.262	58.058	115.320
Asemrowo	24.208	23.814	48.022
Benowo	36.597	36.709	73.306
Pakal	31.540	31.175	62.715
<b>Kota Surabaya</b>	<b>1.490.358</b>	<b>1.518.928</b>	<b>3.009.286</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)*

Tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya populasi ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk menangani berbagai permasalahan terkait administrasi kependudukan guna memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Selain distribusi penduduk per kecamatan, tren jumlah penduduk Surabaya dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami fluktuasi, seperti yang ditampilkan dalam data berikut;

Tabel.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	3.159.481	2,970.730	2,970.952	2.987.863	3.009.286

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)*

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, jumlah penduduk kembali meningkat hingga mencapai 3.009.286 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan jumlah penduduk yang kembali meningkat menuntut peningkatan efektivitas layanan administrasi kependudukan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat akan layanan kependudukan juga semakin meningkat, sehingga inovasi pelayanan seperti Jebol Anduk menjadi solusi yang diperlukan (Nandy, 2018)

Pemerintah Kota Surabaya telah merespons tantangan administrasi kependudukan yang kompleks dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui program inovatif seperti KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) dan Klampid New Generation (KNG), yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan secara daring (Darmawan, 2024). Namun, tidak semua warga mampu mengakses layanan berbasis digital akibat keterbatasan pemahaman teknologi dan ketersediaan perangkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan program Jebol Anduk (Jemput

Bola Administrasi Kependudukan) sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen secara mandiri (Surabaya, 2025).

Program Jebol Anduk bertujuan untuk meningkatkan jangkauan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat bagi seluruh warga Surabaya dengan mendatangi langsung rumah warga yang belum melengkapi dokumen kependudukan. Dokumen yang dilayani mencakup akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan perceraian, pembuatan KIA, aktivasi IKD, hingga perpindahan penduduk. Program ini juga dilaksanakan pada malam hari setiap hari Selasa pukul 18.00 – 20.00, sehingga sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja (Razida, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang dan pengamatan peneliti sebagai peserta magang di Kelurahan Pacarkeling, dapat dipahami bahwa program Jebol Anduk hadir sebagai jawaban dari permasalahan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Tidak semua masyarakat dapat meluangkan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan atau memahami cara mengurusnya melalui aplikasi digital seperti KNG. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi program Jebol Anduk mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Pacarkeling, Kota Surabaya. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi efektivitas program dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mengurangi waktu tunggu pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan implementasi program Jebol Anduk serta inovasi pelayanan publik lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi program Jebol Anduk di Kelurahan Pacarkeling. Prinsip penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Pendekatan deskriptif yang peneliti gunakan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis situasi dan kondisi terkini pada subjek yang bersangkutan dari sudut pandang peneliti, melalui tinjauan pustaka berbasis dukungan atau studi pustaka.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Penulis melakukan observasi di lokus penelitian yaitu Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur yang terletak di Jalan Jolotundo Baru III No.14 untuk meninjau pelaksanaan program Jebol Anduk. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat saat peneliti melakukan pelayanan, serta wawancara kepada warga, staff pelayanan Kelurahan, dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pacarkeling. Dokumentasi yang dilakukan berupa arsip foto, dan dokumen lainnya

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program Jebol Anduk sebagai inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Kelurahan Pacarkeling Kota Surabaya dengan berdasarkan 4 variabel dari Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III dalam (Affrian, 2020) meliputi: 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka menawarkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang sederhana kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai program. Salah satu program yang diperkenalkan adalah Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan (Saddad & Arif, 2023). Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemkot Surabaya juga menginisiasi program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) guna mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Program ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kawasan lingkungan masyarakat yang sadar administrasi kependudukan.

Adapun Implementasi Program Jebol Anduk di Kelurahan Pacarkeling akan dianalisis menggunakan empat variabel dalam Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III dalam (Affrian, 2020), yang meliputi:

### **Komunikasi**

Komunikasi Implementasi Program Jebol Anduk di Kelurahan Pacarkeling. Kebijakan dan ketentuan terkait kepengurusan dokumen kependudukan disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan Pacarkeling yang selanjutnya disampaikan kepada petugas pelaksana program Jebol Anduk. Hal ini meminimalisir terjadinya miskomunikasi dalam mengimplementasikan program Jebol Anduk kepada warga Kelurahan Pacarkeling.

Jadwal pelaksanaan program Jebol Anduk di Kelurahan Pacarkeling disampaikan oleh Petugas Kelurahan kepada masing-masing Ketua RW untuk diinformasikan kepada warga melalui grup WhatsApp. Penyampaian informasi seperti ini sangat membantu warga yang membutuhkan pelayanan Jebol Anduk untuk mempersiapkan persyaratan yang perlu dilengkapi. Warga Kelurahan Pacarkeling juga merasa penyampaian informasi terkait persyaratan, prosedur, hingga waktu kepengurusan dokumen kependudukan melalui program Jebol Anduk disampaikan dengan jelas dan baik oleh Petugas Kelurahan Pacarkeling. Hal ini menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Petugas Kelurahan, dan Warga Kelurahan Pacarkeling sudah berjalan dengan baik dan benar.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi program Jebol Anduk sangat perlu diperhatikan, terutama para petugas yang bertugas melayani kepengurusan dokumen kependudukan. Staf Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pacarkeling sebagai petugas pelayanan dokumen kependudukan telah melewati berbagai sosialisasi, mentoring, serta evaluasi.

Pada saat pertama kali web KLAMPID diluncurkan, staf Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pacarkeling mengikuti rangkaian sosialisasi terkait pengenalan dan pelatihan teknis penggunaan web KLAMPID. Selanjutnya, para staf juga mengikuti mentoring dengan psikolog terkait tata cara memberikan pelayanan sesuai standar yang ditentukan, yang dilaksanakan di Dispendukcapil Surabaya. Dapat dipahami bahwa staf Seksi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pacarkeling memiliki kompetensi yang memadai serta dapat bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditentukan.

Sumber daya dalam implementasi program Jebol Anduk di Kelurahan Pacarkeling juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti balai RW yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung kepengurusan dokumen

kependudukan, antara lain komputer, Wi-Fi, CCTV, meja, kursi, serta kondisi balai yang layak untuk ditempati. Dalam pelaksanaan program Jebol Anduk, yang mendatangi rumah warga secara langsung, petugas menyediakan alat elektronik yang dilengkapi dengan akses internet untuk melakukan proses kepengurusan dokumen kependudukan secara langsung di rumah warga. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh Kelurahan Pacarkeling cukup memadai dalam pelaksanaan program Jebol Anduk.

### **Disposisi**

Petugas Kelurahan Pacarkeling dalam memberikan pelayanan telah menerapkan etika serta tata cara pelayanan yang baik dan benar. Kerja sama yang baik antara Petugas Kelurahan dengan Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di kelurahan turut mendukung kelancaran proses penyelesaian kepengurusan dokumen kependudukan dalam waktu yang tepat. Etika pelayanan yang diterapkan membantu warga memahami persyaratan serta ketentuan dalam kepengurusan dokumen dengan mudah. Jika terdapat warga yang mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan atau ketentuan yang berlaku, petugas kelurahan akan memberikan penjelasan dengan sabar hingga warga benar-benar memahami aturan yang berlaku.

Petugas Kelurahan Pacarkeling juga menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melayani warga dengan mendatangi rumah mereka secara langsung untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Langkah ini sangat membantu warga yang kesulitan datang ke kelurahan karena keterbatasan waktu atau kondisi tertentu. Dokumentasi kegiatan JEBOL ANDUK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Petugas JEBOL ANDUK saat Mendatangi Rumah Warga



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024*

Gambar diatas menunjukkan petugas sedang membantu warga dalam pengurusan dokumen secara langsung. Hal ini mencerminkan komitmen petugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah.

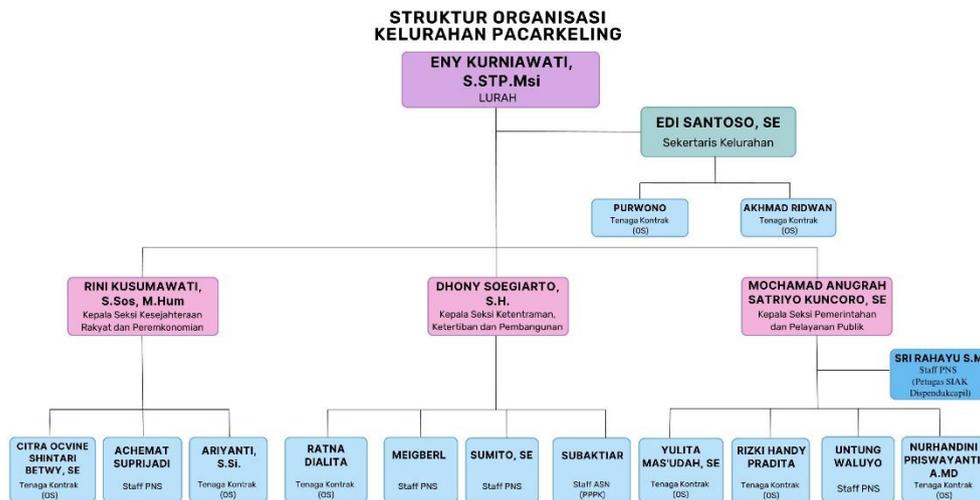
### **Struktur Birokrasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan tugas, fungsi, dan wewenang kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan Pacarkeling untuk mengoordinasikan petugas pelayanan dalam pelaksanaan program Jebol Anduk, khususnya terkait ketentuan dan persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan. Selain itu, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan bertanggung jawab memberikan evaluasi serta arahan kepada petugas dalam menjalankan pelayanan. Kelurahan Pacarkeling ditugaskan untuk melayani warga dalam kepengurusan dokumen

kependudukan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan. Proses verifikasi hingga penerbitan dokumen dilakukan oleh Petugas Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas di kelurahan. Setelah dokumen diterbitkan, petugas kelurahan akan mengirimkannya langsung kepada warga melalui narahubung kelurahan.

Dalam meimplementasi program JEBOL ANDUK, struktur birokrasi di Kelurahan Pacarkeling memiliki peran penting dalam mengatur alur koordinasi dan pembagian tugas. Kepala Kelurahan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program, didukung oleh Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan, dan petugas lapangan. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan untuk memastikan kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Struktur organisasi Kelurahan Pacarkeling dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2: Struktur Organisasi Kelurahan Pacarkeling



Sumber: Kelurahan Pacarkeling (2024)

Gambar di atas menunjukkan hubungan koordinasi antarbagian. Kepala Kelurahan sebagai pemimpin mengkoordinasikan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan yang bertugas mengatur jalannya program di lapangan. Petugas lapangan berperan dalam jemput bola ke rumah warga untuk memudahkan pelayanan dokumen kependudukan.

**KESIMPULAN**

Program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) di Kelurahan Pacarkeling telah berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan, terutama bagi warga yang kesulitan mengurus dokumen secara mandiri. Implementasi program ini berjalan dengan baik berdasarkan empat variabel dalam teori George Edward III dalam (Affrian, 2020): Komunikasi: Informasi terkait jadwal dan persyaratan disampaikan dengan baik melalui Ketua RW dan grup WhatsApp, sehingga masyarakat dapat memahami prosedur dengan jelas. Sumber Daya: Tersedianya tenaga petugas yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai mendukung kelancaran program. Disposisi: Petugas kelurahan memiliki dedikasi dan etika pelayanan yang baik dalam membantu warga memahami dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Struktur Birokrasi: Koordinasi antara Dinas Kependudukan, Kelurahan, dan petugas lapangan berjalan efektif dalam memastikan pelayanan yang efisien. Keberadaan program ini sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke layanan digital, sehingga

meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan kepuasan warga terhadap pelayanan publik di Kelurahan Pacarkeling.

### **Saran**

Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program Jebol Anduk dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Pertama, meningkatkan sosialisasi program melalui berbagai media, seperti media sosial dan pertemuan warga, agar lebih banyak masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan ini. Kedua, menambah jumlah petugas serta memperluas cakupan layanan, terutama ke wilayah dengan jumlah penduduk tinggi atau yang aksesnya terbatas. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pelayanan, seperti penggunaan aplikasi digital dalam sistem jemput bola, dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi. Terakhir, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affrian, D. R. (2020). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Bintang Semesta Media.
- Ananda, A. R., & Nawangsari, E. R. (2024). Implementasi Program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kelurahan Kedung Baruk Kota Surabaya. 10(25), 59–67.
- Badan Pusat Statistik. (2024).
- Darmawan, A. D. (2024). Data BPS 2024, 21,47% Penduduk Kota Surabaya Masih Anak-Anak. [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c97354cd852ed9e/data-bps-2024-21-47-penduduk-kota-surabaya-masih-anak-anak)  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c97354cd852ed9e/data-bps-2024-21-47-penduduk-kota-surabaya-masih-anak-anak>
- Geograf. (2023). Pengertian Administrasi Kependudukan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. [geograf.id](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-administrasi-kependudukan/). <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-administrasi-kependudukan/>
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Kemendagri. (2025). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang tertuang pada BAB X Bagian Kesatu “Kedudukan, Tugas dan Fungsi.” [dukcapil.kemendagri.go.id](https://dukcapil.kemendagri.go.id). <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/tugas-dan-fungsi>
- Lopes, R. (2013). Efektivitas pelayanan publik di kecamatan kendahe kabupaten sangihe. 1–13.
- Nandy. (2018). Pengertian Inovasi: Manfaat, Bentuk dan Contoh-contohnya. [www.gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-inovasi/#1_Menurut_Nurdin_2016). [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-inovasi/#1\\_Menurut\\_Nurdin\\_2016](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-inovasi/#1_Menurut_Nurdin_2016)
- Razida. (2024). Jebol Anduk Awal Juni Disdukcapil Surabaya. [disdukcapil.surabaya.go.id](https://disdukcapil.surabaya.go.id). <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2024/06/07/jebol-anduk-awal-juni-disdukcapil-surabaya/>
- Saddad, A. K. A., & Arif, L. (2023). Pelayanan jemput bola dalam program kawasan lingkungan masyarakat sadar administrasi kependudukan (kalimasada) di kota surabaya. 3.
- Surabaya, D. K. (2025). beberapa inovasi aplikasi dan inovasi layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Disdukcapil Kota Surabaya. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/inovasi/>